



# **Badan Karantina Pertanian**

**KEMENTERIAN PERTANIAN RI**

**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014**  
**STASIUN KARANTINA PERTANIAN**  
**KELAS II BANGKALAN**  
**(018.12.05.00.567371.KD)**

**Jl. Kusuma Bangsa No. 20 Kamal Bangkalan**

**Madura**

**Telp : 031-3012845**

**Email : [skp.bangkalan@yahoo.co.id](mailto:skp.bangkalan@yahoo.co.id)**



# KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bangkalan, Januari 2015  
KEUSAHA PENGGUNA ANGGARAN  
  
Dtn. CICIK SRI SUKARSIH  
NIP 197110221999032001

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Ringkasan	1
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	4
III. Ringkasan Laporan Keuangan	5
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.4. Kebijakan Akuntansi	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	15
B.2. Belanja Negara	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	19
C.1. Aset Lancar	19
C.2. Aset Tetap	22
C.3. Piutang Jangka Panjang	27
C.4. Aset Lainnya	28
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.6. Ekuitas Dana Lancar	31
C.7. Ekuitas Dana Investasi	32
D. Pengungkapan Penting Lainnya	32
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	32
D.5. Pengungkapan Lain-lain	32
A1. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset	34
A2. Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	34

## DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	<b>Hal</b>
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013	2
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	13
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	14
Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	15
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA 2013	16
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014	16
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013	17
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013	17
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013	18
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013	18
Tabel 12 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013	19
Tabel 13 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	20
Tabel 14 : Rincian Belanja Dibayar di Muka	20
Tabel 15 : Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	21
Tabel 16 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	21
Tabel 17 : Rincian Persediaan	22
Tabel 18 : Rincian Aset Tetap	22
Tabel 19 : Rincian Saldo Tanah	23
Tabel 20 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	26
Tabel 21 : Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	27
Tabel 22 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	28
Tabel 23 : Rincian Aset Lainnya	28
Tabel 24 : Rincian Aset Tak Berwujud	28
Tabel 25 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek	30
Tabel 26 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	30
Tabel 27 : Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan	31
Tabel 28 : Rincian Ekuitas Dana Lancar	31
Lampiran : Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap A1	33
Lampiran : Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual A2	34

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester TA. 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.505.185.009.yang terdiri dari Pendapatan Fungsional RP. 457.801.363 dan Pendapatan Umum Sebesar Rp. 47.383.646,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah Rp. 4.172.180.207 (Netto) atau 95.43 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.372.015.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013  
(dalam Rupiah)

Uraian	TA.2014			TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% Real. thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	452.197.000	505.185.009	111.72	570.839.503
Belanja Negara	4.372.015.000,00	4.172.180.207	95.43	6.502.255.406

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 6.987.043.645 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 173.559.381; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.6.805.484.264; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.8.000.000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.19.074.566,- yang terdiri dari hanya Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 19.074.566,- yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 16.513.951,- dan pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp. 2.560.615,-

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 6.967.969.079. yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 154.484.815. dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 6.813.484.264.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2  
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013  
(dalam Rupiah)

Uraian	31-Des-14	31 Des 2013	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	173.559.381	209.395.808	(35.836.427)	-17,11
Aset Tetap	6.805.484.264	6.807.912.820	(2.428.556)	-0,04
Aset Lainnya	8.000.000	8.000.000	-	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>6.987.043.645</b>	<b>7.025.308.628</b>	<b>(38.264.983)</b>	<b>-0,54</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jk Pendek	19.074.566	2.636.260	16.438.306	623,55
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>19.074.566</b>	<b>2.636.260</b>	<b>16.438.306</b>	<b>623,55</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas Dana Lancar	154.484.815	206.759.548	(52.274.733)	-25,28
Ekuitas Dana Invesrasi	6.813.484.264	6.815.912.820	(2.428.556)	-0,04
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>6.967.969.079</b>	<b>7.022.672.368</b>	<b>(54.703.289)</b>	<b>-0,78</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>6.987.043.645</b>	<b>7.025.308.628</b>	<b>(38.264.983)</b>	<b>-0,54</b>

### **3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# **STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN**

Jl. KUSUMA BANGSA NO.20 KAMAL-BANGKALAN,MADURA  
TELEPON /FAX 031-3012845

---

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bangkalan, Januari 2015  
Kuasa Pengguna Anggaran

Drh.CIPIK SRI SUKARSIH  
NIP 197110221999032001



## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETTO) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2014			TA 2013
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	452.197.000	505.185.009	111.72	570.839.503
<b>Jum Pendpt Negara &amp; Hibah</b>		<b>452.197.000</b>	<b>505.185.009</b>	<b>111.72</b>	<b>570.839.503</b>
<b>B. Belanja Negara</b>					
1. Belanja Pegawai	B.2.1	1.567.441.000	1.557.730.764	99.38	1.613.349.884
2. Belanja Barang	B.2.2	2.568.324.000	2.379.685.443	92.66	2.566.794.522
3. Belanja Modal	B.2.3	236.250.000	234.764.000	99.37	2.322.111.000
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>4.372.015.000</b>	<b>4.172.180.207</b>	<b>95.43</b>	<b>6.502.255.406</b>

## IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

#### A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN

Dasar Hukum Entitas  
dan  
Rencana Strategis

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 22 / Permentan / OT.140 / 4 / 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Karantina Pertanian. Pembentukan Stasiun Karantina Pertanian merupakan hasil reorganisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang merupakan perubahan nama dari Stasiun Karantina Hewan Kelas II Kamal.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Pertanian Kelas II BAngkalan berkomitmen dengan visi “ mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati

hewani dan nabati. Dalam melaksanakan tupoksinya Stasiun Karantina Pertanian berdasarkan pada landasan hukum Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan berkomitmen dengan visi “ **Menjadi Stasiun Karantina Pertanian yang Tangguh dan Terpercaya** dalam mempertahankan pulau Madura bebas dari HPHK dan OPTK tertentu ”

Untuk mewujudkan visi tersebut Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan melakukan beberapa langkah-langkah strategis mengacu pada rencana strategis Badan Karantina Pertanian antara lain :

1. Memperkuat kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan
2. Membangun sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan
3. Mengembangkan SDM perkarantinaan yang profesional;
4. Mengembangkan sistem informasi dan publik awareness;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan infrastruktur;
6. Mengembangkan manajemen pelayanan prima

Dalam tataran praktisnya,berbagai rencana strategis kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan Pada Periode Semester II Tahun 2014 yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
2. Melaksanakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
3. Melaksanakan pemantauan daerah sebar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
4. Melakukan pembuatan koleksi Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
5. Melaksanakan pengawasan keamanan Hayati Hewani dan Nabati;
6. Melaksanakan pemberian pelayanan operasional Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan;
7. Melaksanakan pemberian pelayanan operasional pengawasan Keamanan Hayati Hewani dan Nabati;
8. Mengelola system informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan karantina tumbuhan;
9. Melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan

dan Keamanan Hayati Hewani dan Nabati;

10. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kegiatan Strategis yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pertanian hingga saat ini .

Pendekatan Penyusunan  
Laporan Keuangan

### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Sem. II Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan adalah sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi atas  
Pendapatan

#### (1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan Akuntansi atas  
Belanja

## (2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan Akuntansi atas  
Aset

## (3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

#### Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### Piutang Jangka Panjang

#### Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Aset Lainnya

#### Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

#### (4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

**(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana**

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

**(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .



Tabel 3  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan Akuntansi atas  
Penyusutan Aset Tetap

#### (7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan Hibah  
Rp.505.185.009

**B.1 Pendapatan Negara dan Hibah**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 505.185.009. Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional dan Umum

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	2014		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%Real Angg.
1	Pendapatan dari Penjualan Tanah, gedung dan bangunan	-	-	-
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN lainnya	2.197.000	29.250.000	1.331.36
3	Pendapatan Sensor, Pemeriksaan/ Pengawasan karantina	450.000.000	457.801.363	101.73
4	Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-
5	Pendapatan Pelunasan Piutang non bendahara	-	14.415.056	-
6	Pendapatan Pelunasan Ganti rugi atas Kerugian yang di derita oleh Negara	-	3.718.590	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>505.185.009</b>	<b>111.71</b>

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNB pada TA 2014 mengalami penurunan sebesar (12) persen dari realisasi pendapatan dari PNB pada TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain:

- i. Pada TA 2014 Terdapat Aset yang di lelang lebih kecil dari pada TA.2013 .dan pada TA. 2014, Frekuensi dan Volume Pengiriman Ternak Sapi Ke Luar Pulau Madura menurun .

Tabel 6  
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA.2013

URAIAN	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	29.250.000	38.600.000	(24,22)
2. Pendapatan Jasa	457.801.363	516.719.483	(11,40)
3. Pendapatan Lain-lain	18.133.646	15.520.020	16,84
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>505.185.009</b>	<b>570.839.503</b>	(11,50)

## B.2. Belanja Negara

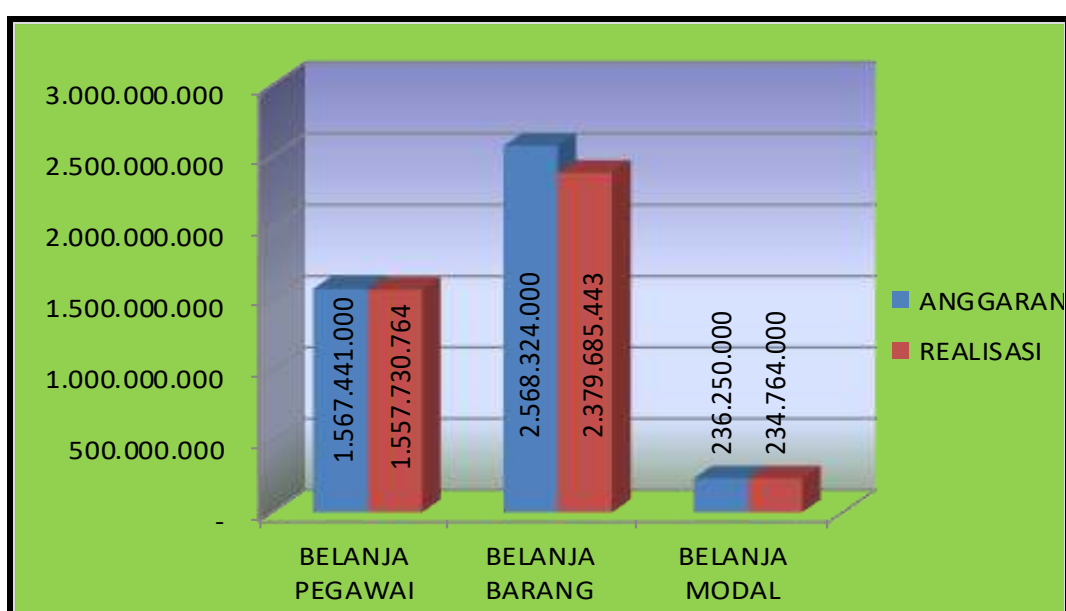
Realisasi Belanja Negara Rp. 4.172.180.207

Realisasi belanja Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan pada TA 2014 adalah sebesar Rp. 4.172.180.207 (netto) atau 95,43% dari anggaran senilai Rp. 4.372.015.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sem I TA 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1.567.441.000	1.557.733.426	99,38
Belanja Barang	2.568.324.000	2.380.040.243	92,67
Belanja Modal	236.250.000	234.764.000	99,37
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>4.372.015.000</b>	<b>4.172.537.669</b>	<b>95,44</b>
Pengembalian Belanja		357.462	0
<b>Belanja Netto</b>	<b>4.372.015.000</b>	<b>4.172.180.207</b>	<b>95,43</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2014 dan TA 2013 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2014 mengalami Penurunan sebesar (35,83) persen dibandingkan realisasi belanja pada TA. 2013.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Belanja Modal Lebih Kecil dibandingkan TA.2013.

Tabel 8  
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA.2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.557.730.764	1.613.349.884	(3,45)
Belanja Barang	2.379.685.443	2.566.794.522	(7,29)
Belanja Modal	234.764.000	2.322.111.000	(89,89)
Jumlah Belanja	4.172.180.207	6.502.255.406	(35,83)

Belanja Pegawai  
Rp. 1.557.730.764

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan pada TA 2014 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Lembur; Belanja Uang makan.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.557.730.764 (netto) dan Rp. 1.613.349.884 (netto). Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja Sem. TA 2014 mengalami penurunan sebesar (3,45) persen dari realisasi belanja TA 2013.

Tabel 9  
Perbandingan Belanja Pegawai TA.2014 dan TA 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.439.467.426	1.494.570.533	(3,69)
Belanja Lembur	118.266.000	118.787.000	(0,44)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.557.733.426</b>	<b>1.613.357.533</b>	<b>(3,45)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	2.662	7.649	(65,20)
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>1.557.730.764</b>	<b>1.613.349.884</b>	<b>(3,45)</b>

Belanja Barang  
Rp. 2.379.685.443

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.379.685.443 dan Rp. 2.566.794.522. Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2014 mengalami Penurunan (7,29) persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain adanya Penurunan belanja barang non operasi dan perjalanan dalam negeri.

Tabel 10  
Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

Uraian	Realisasi TA.2014	Realisasi TA.2013	% Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional	883.202.727	762.776.490	15,79
Belanja Barang Non Operasional	436.199.000	627.331.750	(30,47)
Belanja Jasa	104.485.621	89.941.470	16,17
Belanja Pemeliharaan	381.703.395	311.371.859	22,59
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	574.449.500	775.372.953	(25,91)
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>2.380.040.243</b>	<b>2.566.794.522</b>	<b>(7,28)</b>
Pengembalian	Rp 354.800		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.379.685.443</b>	<b>Rp 2.566.794.522</b>	<b>(7,29)</b>

Belanja Modal  
Rp.234.764.000

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.234.764.000 dan Rp. 2.322.111.000.

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2014 mengalami Penurunan sebesar (89,89) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada TA. 2014 Hanya ada Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2. Adanya pembangunan gedung Kantor Induk di Tahun 2013

Tabel 11  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013

Uraian	REALISASI TA.2014	REALISASI TA.2013	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 234.764.000	Rp 131.220.000	78,91
Belanja modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 19.700.000	(100,00)
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 14.950.000	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 2.156.241.000	(100,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 234.764.000</b>	<b>Rp 2.322.111.000</b>	<b>(89,89)</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>Rp 234.764.000</b>	<b>Rp 2.322.111.000</b>	<b>(89,89)</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar Rp.  
173.559.381

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.173.559.381 dan Rp 209.395.808.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12  
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

No	Aset Lancar	TA.2014	TA.2013
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
2	Kas di bendahara penerima	Rp 2.560.615	Rp 476.260
3	Kas lainnya dan setara kas	Rp -	Rp -
4	Belanja di bayar di muka	Rp 2.157.000	Rp 1.905.000
5	piutang bukan pajak	Rp -	Rp -
6	Bag Lancar Tagihan TP/TGR	Rp -	Rp -
7	<i>Penyisihan Pitang tak tertagih Bagian Lancar TP/TGR</i>	Rp -	Rp -
8	<i>Bag Lancar Tagihan TP/TGR</i>		
9	Persediaan	Rp 168.841.766	Rp 207.014.548
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 173.559.381</b>	<b>Rp 209.395.808</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp.NIHIL

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 00,- dan Rp 00 ,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang Sudah dipertanggung jawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari :

Tabel11  
RincianKas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	31/12/2014	31/12/2013
1	Uang Persediaan Brankas	Rp -	Rp -
2	Uang Persediaan di Bank	Rp -	
3	Kwitansi UP yang belum di SPM-GU kan	Rp -	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

Kas di Bendahara  
Penerima Rp.2.560.615

### C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar masing-masing Rp. 2.560.615 dan Rp 476.260. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan pada tanggal pelaporan adalah Rp.2.560.615. saldo kas tersebut sudah di setor pada tanggal 07 januari 2015, terdiri dari 2 wilker yaitu wilker tlaqa biru dan wilker suramadu dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE BILLING	NO NTPN	TANGGAL	JUMLAH
1	820150106000643	A90C30N9TG9RM383	07/01/2015	859.565
2	820150106000424	8609E0N9TG9RM318	07/01/2015	800
3	820150106000381	12AF20N9TG9RM2VT	07/01/2015	390.000
4	820150106000356	3EBA30N9TG9RM2V4	07/01/2015	1.310.250
<b>JUMLAH</b>				<b>2.560.615</b>

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp.0

### C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	T.A. 2014	T.A. 2013
1	-	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Belanja Dibayar di  
Muka Rp. 2.157.000

### C.1.4. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.157.000. dan Rp.1.905.000. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.



Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14  
Rincian Belanja Dibayar di Muka

No	Jenis	Sem. I 2014	T.A. 2013
1	Sewa Tanah Di Wilker Tlagabiru	1.905.000	1.905.000
2	Sewa Tanah Di Wilker Kalianget	252.000	-
		-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.157.000</b>	<b>-</b>

Bag Lancar TGR Rp.0

### C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 18 merupakan tagihan kepada bendaharawan dan para pegawai masing-masing.

Tabel 15  
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	T.A. 2014	T.A. 2013
1	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>10.500.000</b>

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Bag Lancar Tagihan TP/TGR 2014	0
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2014	0
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>0</b>

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR Rp.0

### C.1.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0. Dan Rp 0

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian estimasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersaji pada Tabel 16.

Tabel 16  
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyusutan
<b>Jumlah</b>				

Persediaan

Rp.168.841.766

### C.1.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 168.841.766 dan Rp. 207.014.548.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 17.

Tabel 17  
Rincian Persediaan

No	Persediaan	T.A 2014	T.A 2013
1	Barang Konsumsi	35.381.978	44.673.713
2	Barang untuk Pemeliharaan	3.708.796	2.071.647
3	Suku Cadang	6.965.490	-
4	Bahan Baku	122.785.502	140.685.614
5	Persediaan Untuk tujuan Strategis	-	19.583.574
<b>Jumlah</b>		<b>168.841.766</b>	<b>207.014.548</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp.6.805.484.264

### C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp. 6.805.484.264 dan Rp. 6.807.912.820,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan Per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 18

Tabel 18  
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2014	T.A 2013
1	Tanah	420.525.000	420.525.000
2	Peralatan dan Mesin	2.806.326.172	2.716.394.672
3	Gedung dan Bangunan	6.032.989.079	6.043.554.135
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.793.000	109.793.000
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>9.369.633.251</b>	<b>9.290.266.807</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(2.564.148.987)	(2.482.353.987)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>6.805.484.264</b>	<b>6.807.912.820</b>

Tanah Rp.420.525.000

### C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.420.525.000. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2014. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl.Kusuma Bangsa No. 20 Ds. Banyu ajuh Kamal Bangkala, Di Wilker Branta Pamekasan dan Di Wilker Kangean P. Kangean Kab.Sumenep

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19  
Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai
1	NUP. 4 (Mess)	468m2	Rp 68.500.000
2	NUP.1 (Gedung Kantor)	564m2	Rp 252.742.500
3	NUP.2 (Wilker Branta)	200m2	Rp 49.282.500
4	NUP. 3(Wilker Kangean)	406m2	Rp 50.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 420.525.000</b>

Tanah tersebut sudah bersertifikat semua .

Peralatan dan Mesin Rp  
2.806.326.172

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 2.806.326.172 dan Rp. 2.716.394.672.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>2.716.394.672</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
Pembelian	Rp	234.764.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Pengembangan Nilai aset	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Penggunaan Kembali Aset yang Dihentikan	Rp	-
<b>Mutasi kurang:</b>		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(144.832.500)
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>2.806.326.172</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp	(1.947.364.995)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>858.961.177</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin meliputi :

a. Penambahan dari pembelian yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Rupiah
1	Meja Rapat	10 unit	Rp. 25.000.000
2	Kursi Rapat	50 unit	Rp. 42.500.000
3	Kursi Pimpinan Rapat	4 unit	Rp. 7.200.000
4	Lemari Besi Metal	6 unit	Rp. 17.400.000
5	Lemari Obat Kaca	1 unit	Rp. 1.570.000
6	Partisi	1 unit	Rp. 56.000.000
7	Power Suplay Micropohone	1 unit	Rp. 4.400.000
8	Microphone Wireles	1 unit	Rp. 2.400.000
9	Profesional Sound	1 unit	Rp. 3.700.000
10	Audio Amplifer	1 unit	Rp. 4.440.000
11	Laptop	1 unit	Rp. 16.280.000
12	Laptop	1 unit	Rp. 13.460.000
13	Printer	2 unit	Rp. 7.900.000
14	Sepeda Motor	1 unit	Rp. 17.634.000

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin meliputi :

a. Pengurangan melalui Penghentian aset dari penggunaan berupa :

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Rupiah
1	Station Wagon	1 unit	Rp. 49.899.000
2	Meja Kerja Kayu	2 buah	Rp. 203.000
3	Kursi Besi Metal	3 buah	Rp. 548.000
4	Kursi Kayu	4 buah	Rp. 964.000
5	Dispenser	1 buah	Rp. 940.500
6	Handycam	1 unit	Rp. 8.989.000
7	UPS	1 buah	Rp. 794.000

8	Camera Film	1 buah	Rp.	2.639.000
9	Syring Tuberculine 1 ml	1 buah	Rp.	2.773.000
10	Meja Obat	1 buah	Rp.	159.000
11	Multichanel Pipet	1 buah	Rp.	7.141.000
12	PC. Unit	2 Buah	Rp.	23.692.000
13	Laptop	2 unit	Rp.	37.091.000
14	Printer	2 buah	Rp.	9.000.000

Rincian Aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan  
Rp.6.032.989.079

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 6.032.989.079 dan Rp. 6.043.554.135

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>6.043.554.135</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Penyelesaian Pembangunan	-
Reklasifikasi Masuk	-
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Koreksi Pencatatan	(10.565.056)
Reklasifikasi Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>6.032.989.079</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(592.790.787)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2014</b>	<b>5.440.198.292</b>

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan meliputi :

- a. Pengurangan Penghentian Penggunaan yang terdiri dari :
  - Koreksi Nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen Rp. (10.565.056)

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp  
Rp.109.793.000

### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 109.793.000 dan Rp. 109.793.000 Saldo tersebut terdiri dari Irigasi dan jaringan.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>109.793.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- Pengembangan Nilai Aset	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- Koreksi nilai	-
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>109.793.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(23.993.205)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2014</b>	<b>85.799.795</b>

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2014 Tidak ada.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap (Rp.  
2.564.148.987)

### C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing Rp. 2.564.148.987,- dan Rp2.501.486.987 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 20, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 20  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 2.806.326.172	Rp 1.947.364.995	Rp 858.961.177
2	Gedung dan Bangunan	Rp 6.032.989.079	Rp 592.790.787	Rp 5.440.198.292
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 109.793.000	Rp 23.993.205	Rp 85.799.795
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp 8.949.108.251</b>	<b>Rp 2.564.148.987</b>	<b>Rp 6.384.959.264</b>

Tuntutan  
Perbendaharaan Rp0

### C.3 Piutang Jangka Panjang

#### C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21  
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Jumlah
	Jumlah	

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp0,00</b>
Mutasi tambah:	
- TGR	Rp0,00
Mutasi kurang:	
- Pelunasan TGR	Rp0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp0,00</b>

Penyisihan Piutang tak  
Tertagih - Tuntutan  
Perbendaharaan Rp0

#### C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22  
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Total</b>				-

Aset Lainnya  
Rp.8.000.000

#### C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp8.000.000. dan Rp8.000.000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23  
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	TA.2014	2013
1	Aset Tak Berwujud	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
2	Aset Lain-Lain	Rp -	Rp 19.133.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 8.000.000</b>	<b>Rp 27.133.000</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		Rp -	Rp (19.133.000)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2014</b>		<b>Rp 8.000.000</b>	<b>Rp 8.000.000</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp8.000.000

##### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp8.000.000. dan Rp8.000.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24  
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 8.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 8.000.000</b>

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Transfer Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>8.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2014</b>	<b>8.000.000</b>

Aset Lain-Lain Rp NIHIL

#### C.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. Nihil dan Rp19.133.000.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2013</b>	<b>19.133.000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Penghentian Aset dari Penggunaan	144.832.500
<b>Mutasi Keluar :</b>	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
Penghapusan BMN yang di Hentikan	163.965.500
<b>Saldo Per 31 Desember 2014</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2014	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2014</b>	<b>-</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan dari Penghentian Aset dari Penggunaan Sebesar Rp. 144.832.500 yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Rupiah
1	Station Wagon	1 unit	Rp. 49.899.000
2	Meja Kerja Kayu	2 buah	Rp. 203.000
3	Kursi Besi Metal	3 buah	Rp. 548.000
4	Kursi Kayu	4 buah	Rp. 964.000
5	Dispenser	1 buah	Rp. 940.500
6	Handycam	1 unit	Rp. 8.989.000
7	UPS	1 buah	Rp. 794.000
8	Camera Film	1 buah	Rp. 2.639.000
9	Syring Tuberculine 1 ml	1 buah	Rp. 2.773.000
10	Meja Obat	1 buah	Rp. 159.000
11	Multichanel Pipet	1 buah	Rp. 7.141.000

12	PC. Unit	2 Buah	Rp.	23.692.000
13	Laptop	2 unit	Rp.	37.091.000
14	Printer	2 buah	Rp.	9.000.000

- Pengurangan berupa Penghapusan BMN yang di hentikan sebesar Rp. 163.965.500 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Rupiah
1	Station Wagon	1 unit	Rp. 49.899.000
2	Meja Kerja Kayu	2 buah	Rp. 203.000
3	Kursi Besi Metal	3 buah	Rp. 548.000
4	Kursi Kayu	4 buah	Rp. 964.000
5	Dispenser	1 buah	Rp. 940.500
6	Handycam	1 unit	Rp. 8.989.000
7	UPS	2 buah	Rp. 2.544.000
8	Camera Film	1 buah	Rp. 2.639.000
9	Syring Tuberculine 1 ml	1 buah	Rp. 2.773.000
10	Meja Obat	1 buah	Rp. 159.000
11	Multichanel Pipet	1 buah	Rp. 7.141.000
12	PC. Unit	2 Buah	Rp. 23.692.000
13	Laptop	3 unit	Rp. 54.474.000
14	Printer	2 buah	Rp. 9.000.000

## KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka  
Pendek Rp.19.074.566

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp. 19.074.566 dan Rp.2.636.260,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25  
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Aset Lancar	Jumlah
1	Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 16.513.951
2	Uang Muka dari KPPN	Rp -
3	Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp 2.560.615
4	Pendapatan Diterima di Muka	Rp -
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 19.074.566</b>

Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp. 16.513.951

### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp. 16.513.951 dan Rp 2.160.000.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 11.313.835	Gaji Susulan CPNS 1 Orang TMT 1 Juli 204 s.d Nopember 2014 An. Supanggi NIP.197506032014071002
2	Belanja Barang yang masih harus di bayar	Rp 5.200.116	Tagihan Listrik,Telpon,Air dan Internet Bulan Desember 2014 dibayar bulan januari 2015
<b>Total</b>		<b>Rp 16.513.951</b>	

Pendapatan Yang  
Ditangguhkan  
Rp.2.560.615,-

### C.5.2 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp. 2.560.615 dan Rp.476.260.

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2014

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27  
Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan PNPB yang belum di setor	Rp 2.560.615
2	PPH yang belum disetor	Rp -
3	PPN yang belum disetor	Rp -
<b>Total</b>		<b>Rp 2.560.615</b>

## EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar  
Rp.154.484.815

### C.6 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 28

Rincian Ekuitas Dana Lancar disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28  
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No.	Aset Lancar	TA 2014	TA 2013
1	Cadangan Piutang	Rp -	Rp -
2	Cadangan Persediaan	Rp 168.841.766	Rp 207.014.548
3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek	Rp (16.513.951)	Rp (2.160.000)
4	Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	Rp 2.157.000	Rp 1.905.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 154.484.815</b>	<b>Rp 206.759.548</b>

Cadangan Piutang Rp.0

#### C.6.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang tersaji per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp.0.

Cadangan Piutang merupakan jumlah ekuitas dana lancar Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan  
Rp.168.841.766

#### C.6.2. Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp168.841.766 dan Rp. 207.014.548.

Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan dalam bentuk persediaan.

Dana yang Harus  
Disediakan untuk  
Pembayaran Utang  
Jangka Pendek  
Rp(16.513.951.)

### **C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek**

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp (16.513.951) dan Rp. (2.160.000).

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Belanja/Jasa yang Masih  
Harus Diterima Rp  
2.157.000

### **C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima**

Nilai Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp. 2.157.000 dan Rp 1.905.000. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

## **C.7 Ekuitas Dana Investasi**

Diinvestasikan dalam  
Aset Tetap Rp  
6.805.484.264

### **C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 6.805.484.264 dan Rp. 6.807.912.820. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam  
Aset Lainnya Rp  
8.000.000

### **C.7.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya**

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 8.000.000. dan Rp 8.000.000.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

## **D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **D.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Pada Satker SKP Kelas II Bangkalan mendapatkan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2014 sebesar Rp.61.83.500 untuk 28 orang Pegawai yang berasal dari Pusat dan telah ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Pusat per tanggal 29 Desember 2014 melalui Bank Mandiri Cabang Ragunan Pasar Minggu ke Bank Mandiri Cabang Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Dana Tunjangan Kinerja tersebut baru diterima di Rekening Bendahara Pengeluaran Satker SKP Kelas II Bangkalan per tanggal 02 Januari 2015 dikarenakan padanya proses kliring antar Bank .

**Lampiran A1**

**Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan**  
**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014**

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
<b>A</b>	<b>TANAH</b>				
1	Tanah Persil		420.525.000	-	420.525.000
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>				
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	796.073.500	406.690.500	389.383.000
2	Alat Ukur	5	15.390.000	15.390.000	-
3	Alat Pengolahan	4	37.280.000	34.655.000	2.625.000
4	Alat Kantor	5	108.952.000	85.805.200	23.146.800
5	Alat Rumah Tangga	5	458.372.000	297.216.200	161.155.800
6	Alat Studio	5	72.647.462	26.269.382	46.378.080
7	Alat Komunikasi	5	29.095.000	24.133.000	4.962.000
8	Peralatan Pemancar	10	65.575.000	29.537.000	36.038.000
9	Alat Kedokteran	5	21.568.000	19.793.000	1.775.000
10	Unit Alat Laboratorium	8	599.190.000	509.688.752	89.501.248
11	Komputer Unit	4	362.088.054	292.232.709	69.855.345
12	Peralatan Komputer	4	236.934.156	202.518.252	34.415.904
13	Unit Peralatatan/Proses Produksi	8	4.561.000	3.436.000	1.125.000
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5.125.508.207	477.553.613	4.647.954.594
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	199.046.340	29.856.945	169.189.395
3	Tugu/Tanda Batas	50	720.684.532	85.380.229	635.304.303
<b>D</b>	<b>Irigasi</b>				
1	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	51.550.500	10.707.951	40.842.549
<b>E</b>	<b>JARINGAN</b>				
1	Instalasi Lain	5	9.900.000	7.920.000	1.980.000
	Jaringan Air Minum	30	8.300.000	1.244.997	7.055.003
1	Jaringan Listrik	40	40.042.500	4.120.257	35.922.243
	<b>Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap</b>		<b>9.383.283.251</b>	<b>2.564.148.987</b>	<b>6.819.134.264</b>

**Lampiran A2**

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN  
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2014**

BAGIAN ANGGARAN : (018) Departemen Pertanian  
 ESELON1/UAPPA-E1 : (012) Badan Karantina Pertanian  
 UAPPA-W : (05.08) Jawa Timur  
 SATUAN KERJA : (567371) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

Nomor	Pendapatan/ Belanja		Realisasi Menurut	Penyesuaian AkruaI (Rp)		Informasi	Dokumen
	Kode Akun	Uraian		Basis Kas	Tambah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	511111	Gaji Pokok PNS	933.617.800	7.932.800	-	941.550.600	Kekurangan Gaji TMT 1 Juli 2014 s/d 30 Nopember 2014 SK. CPNS Atas Nama Supanggi No.512/Kpts/KP.2 30/A2/VII/2014 tgl. 03 Juli 2014
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.145	245		19.390	
3	511121	Belanja Tunjangan Istri PNS	87.748.546	793.280		88.541.826	
4	511122	Belanja Tungan Anak PNS	20.787.328	317.310		21.104.638	
5	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16.655.000	875.000		17.530.000	
6	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	65.644.160	1.395.200		67.039.360	
7	522141	Belanja Sewa	7.620.000		1.905.000	5.715.000	Kontrak sewa tanah wilker Tlagabiru No :UM.202./13/IV/U PP/.Tlb-2013
8	522141	Belanja Sewa	756.000		252.000	504.000	Kontrak Sewa Tanah Wilker Kalianget : No.07095/ROUM/IX/2013
9	423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	457.801.363	2.560.615		460.361.978	SSBP Saldo Kas Bend. Penerima Per 31 Des 2014 di setor 06 Januari 2015 Berdasarkan LPJ Bend. Penerima
10	522111	Langganan Listrik	60.512.553	4.244.283		64.756.836	Tagihan Listrik Bulan Januari 2015
11	522112	Langganan Telpon	10.427.618	424.833		10.852.451	Tagihan Telpon Bulan Januari 2014

Nomor	Pendapatan/ Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
12	522113	Langganan Air	7.612.470	239.000		7.851.470	Tagihan Air PDAM Tagihan Air Bulan Desember 2014
13	521111	Langganan Internet	9.355.482	292.000		9.647.482	Langganan Internet Bulan Januari 2015
		JUMLAH	1.678.557.465	19.074.566	2.157.000	1.695.475.031	

Bangkalan, Januari 2015  
Kepala Stasiun Karantina Pertanian  
Kelas II Bangkalan

DRH.CIPIK SRI SUKARSIH  
NIP. 197110221999032001